

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk memajukan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang baik, diperoleh hal-hal baru sehingga dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Suatu bangsa apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu membangun bangsanya menjadi lebih maju. Oleh karena itu, setiap bangsa hendaknya memiliki pendidikan yang baik dan berkualitas. Laju percepatan perkembangan teknologi memiliki dampak yang besar terhadap kemajuan era 4.0 sehingga kemudian sekarang muncul era baru yang merupakan respon digitalisasi dari era 4.0 yaitu *era Society 5.0* (Rahayu, 2021). Konsep ini muncul disebabkan pengembangan revolusi industri 4.0 di rasa berpotensi merendahkan derajat manusia. Melalui *Society 5.0* manusia bisa mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang telah berkembang. Harapan Negara Jepang dengan adanya *era Society 5.0* yaitu manusia terus bisa berkembang dan tetap eksis dikala teknologi buatan semakin canggih, begitu juga dengan Negara lainnya.

Negara-negara di dunia sedang berupaya untuk memperbaiki struktur kehidupan di negaranya masing-masing supaya tidak tertinggal dengan teknologi buatan yang semakin canggih tak terkecuali Negara Indonesia, Indonesia sudah berusaha melakukan perbaikan mutu di beberapa aspek kehidupan, seperti halnya

dalam aspek kehidupan sosial dan aspek pendidikan. Kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dengan adanya suatu pendidikan yang baik maka kehidupan sosial pun menjadi lebih sejahtera. Sistem pendidikan Indonesia sering kali mengalami perubahan, yang didasarkan pada teori yang berkembang dan kewenangan pemangku kebijakan. Sistem pendidikan harus terus dikembangkan untuk generasi masa depan yang tanggap dengan segala tantangan. Saat ini banyak dijumpai pekerjaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi sehingga sangat berdampak pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh sebab itu masyarakat harus memperoleh pendidikan yang layak agar memiliki kreativitas dan mampu menyeimbangi perkembangan teknologi agar kodrat sebagai manusia tetap menjadi yang utama dalam menjalankan kehidupan berkelanjutan. Perkembangan teknologi atau yang sering disebut dengan disrupsi teknologi terjadi karena adanya dorongan perubahan yang drastis dari masyarakat industri menjadi industri teknologi dan informasi. Disrupsi menggambarkan keadaan yang terjadi akibat adanya perubahan keadaan industri yang berawal dari perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat (Suwardana, 2018). Adanya perubahan keadaan industri ini pun membuat proses pembelajaran dalam dunia pendidikan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap segala perkembangan yang terjadi.

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang digunakan pemerintah untuk menumbuhkan sumber daya manusia. Pendidikan berperan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kecerdasan bangsa. Kemudian, pendidikan apa yang sesuai dan siapa yang menjadi peran utama dalam masalah tersebut. Mengacu kepada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, pasal 15 menyatakan “jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Dalam penjelasannya dinyatakan sebagai berikut, bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang keahlian tertentu. Proses pembelajaran pada era 5.0 menuntut manusia agar bisa selaras dengan teknologi yang sedang berkembang pesat dalam menciptakan uang kreatif dan inovatif (Arjunaita, 2020).

Konsep " *Society 5.0* pertama kali dicetuskan oleh Jepang, yang merupakan suatu konsep masyarakat dimana segala kegiatan yang ada dalam masyarakat berpusat pada manusia yang diimbangi dengan teknologi. Konsep ini muncul disebabkan pengembangan revolusi industri 4.0 di rasa berpotensi merendahkan derajat manusia. Melalui *Society 5.0* manusia bisa mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang telah berkembang (Maghfiroh & Sholeh, 2022). Harapan Negara Jepang dengan adanya *era Society 5.0* yaitu manusia terus bisa berkembang dan tetap eksis dikala teknologi buatan semakin canggih, begitu juga dengan Negara lainnya. *Era Society 5.0* sebagai kelanjutan dari Era Revolusi Industri 4.0 merupakan teknologi yang dianggap akan menimbulkan penurunan manusia (Ngafifi, 2014). *Society 5.0* merupakan era yang dicetuskan oleh pemerintahan Jepang. Konsep masyarakat berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Di dalam konsep “*Society 5.0*” ini manusia berperan penting dengan mentransformasi big data menjadi suatu kearifan baru yang meningkatkan kemampuan manusia untuk membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan demi tercapainya kehidupan bermakna (Nastiti & Abdu, 2020).

Pendidikan di Indonesia terus berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Kebijakan pendidikan di Indonesia pun terus berubah guna memenuhi kebutuhan zaman. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ialah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan MBKM dirancang guna mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kehidupan profesional, dan perkembangan teknologi yang cepat (Dimmera et al., 2023). Dengan adanya MBKM ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia pendidikan yang semakin rumit. Kemunculan Kampus Merdeka merumuskan paradigma baru dalam pendidikan, salah satunya menjadikan setiap perguruan tinggi lebih otonom agar dapat menciptakan budaya pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Pemerintah, sebagai entitas publik yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menyediakan pendidikan, bertanggung jawab atas keberhasilan tujuan kebijakan MBKM ini.

Masyarakat juga perlu mengakui peran mereka sebagai pengguna layanan pendidikan, tidak hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan keseimbangan antara tujuan dan pencapaian. Penerapan kebijakan MBKM adalah salah satu tujuan pemerintah saat ini. Kebijakan MBKM ini tentunya memiliki banyak tantangan dan hambatan untuk diterapkan. Pemahaman mahasiswa tentang kebijakan MBKM sangat penting untuk keberhasilan program. Hal ini karena pemerintah seharusnya

membuat kebijakan tersebut agar mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja setelah lulus.

Program MBKM mulai dikembangkan pada tahun 2020 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kemendikbud, 2020) pasal 18. Pokok-pokok dalam kebijakan MBKM (Tohir, 2020) meliputi: (1) pembukaan program studi baru; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) perguruan tinggi badan hukum; (4) hak belajar tiga semester di luar program studi. Program hal belajar tiga semester di luar program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat belajar tidak hanya di dalam kampus tetapi juga bisa di luar kampus, tentunya dengan berbagai program di dalamnya (Putri, 2020).

Beberapa kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilaksanakan pada program hal belajar tiga semester diluar program studi meliputi: pertukaran pelajar, magang praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, KKN tematik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fuadi & Aswita, 2021) yang menyatakan bahwa konsep merdeka belajar merupakan konsep yang menyuarakan kemerdekaan dalam belajar untuk mengupayakan kesiapan lulusan baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta agar mampu menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat.

Terdapat 8 program MBKM yang dicanangkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia, beberapa program yang telah dilaksanakan oleh perguruan

tinggi swasta diantaranya program pertukaran pelajar antar prodi maupun antar perguruan tinggi baik di dalam perguruan tinggi maupun luar perguruan tinggi. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi MBKM ini diantaranya: 1) proses adaptasi kurikulum dengan program MBKM, 2) kerja sama antar perguruan tinggi yang masih terbatas, 3) kolaborasi antara perguruan tinggi swasta di Aceh dengan lembaga diluar perguruan tinggi, 4) pengelolaan dana yang belum dianggarkan untuk program MBKM, 5) kualitas serta produktivitas SDM kurang memumpuni (Fuadi & Aswita, 2021).

Permasalahan serupa juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Arifin & Muslim, 2020) bahwa setiap adanya kebijakan baru yang dibuat akan menimbulkan pro dan kontra bagi setiap individu maupun lembaga yang melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan baru sangat tidak mungkin berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana yang dibuat, pada saat pengimplementasian pasti menemukan berbagai tantangan di setiap prosesnya. Tak terkecuali implementasi merdeka belajar kampus merdeka, berikut merupakan tantangan yang dihadapi dalam implementasi merdeka belajar, kampus merdeka yakni 1) prosedur kolaborasi prodi dengan mitra luar perguruan tinggi; 2) transformasi pola pada PTN-BH untuk beradu di tingkat internasional; 3) prosedur magang yang dilakukan di luar program studi. Solusi untuk menghadapi tantangan implementasi kebijakan merdeka belajar menteri pendidikan dan kebudayaan perlu mengkaji ulang karakteristik perguruan tinggi, permasalahan pendidikan yang belum terselesaikan.

Hadirnya *Era Society 5.0*, Indonesia dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar mampu menemukan solusi dalam memenuhi kebutuhannya dengan terus menggali informasi, serta menciptakan inovasi baru guna menunjang kelangsungan hidupnya agar dapat bersaing di dunia global yang lebih kompleks. Hal ini merupakan tantangan pendidikan untuk menciptakan SDM yang berkualitas di masa depan. Penelitian sebelumnya dari McKinsey menunjukkan, bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan salah satunya adalah minimnya SDM yang berkualitas (Ningrum, 2016).

Sistem pendidikan Indonesia masih dinilai kurang karena belum mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. Dalam menghadapi *Era Society 5.0*, bidang pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Maka dari itu, pemerintah mulai menerapkan program merdeka belajar. Program ini dibuat agar menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja serta kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, mahasiswa harus disiapkan untuk bisa bersiap sesuai dengan kebutuhan zaman (Tohir, M, 2020). Program merdeka belajar ini muncul dari keluhan dari orang tua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini.

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan di Indonesia juga harus sejalan dengan konsep *Society 5.0*. Konsep pendidikan di Indonesia harus berubah agar target *Society 5.0* di masyarakat juga tercapai. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan atau konsep kurikulum yang sejalan dengan perkembangan era. Perlu memiliki rancangan kurikulum yang bermuatan kompetensi berupa kecakapan yang dibutuhkan masyarakat *Society 5.0* dan era Industri 4.0. Era Industri 4.0 lebih

dominan ke aspek teknologinya, bukan pada manusia sebagai pusatnya, *Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT)* dimanfaatkan sebagai perangkat bantuan untuk manusia agar hidup lebih berkualitas. Jangan sampai terbalik, manusia menjadi korban kecanggihan teknologi, diantaranya muncul gejala tidak lagi mampu berpikir kritis dan percaya sepenuhnya pada kemampuan teknologi.

Setiap lembaga pendidikan memiliki tugas mempersiapkan sumber daya manusia yang inovatif dan sanggup dalam berkarir, menguasai teknologi, berkarakter, dan mampu berkomunikasi dengan baik di masyarakat. Model pembelajaran yang berorientasi penguatan kompetensi atau kecakapan hidup berkarir, selalu belajar dan berinovasi, menguasai teknologi media informasi, berpikir kritis dalam memecahkan persoalan, terampil berkomunikasi, berjiwa kreatif dan inovatif serta dapat bekerja sama dalam suatu kelompok, sangat diperlukan dan dikembangkan secara kreatif oleh para pendidik.

Sejak bergulirnya era reformasi, banyak kalangan terperanjat dengan problematika pendidikan yang ada di negara kita ini. Hal ini bermula dari penilaian banyak orang terhadap output hasil pendidikan di Indonesia yang belum sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Kemerosotan moral anak-anak bangsa, etos kerja yang kurang, keterampilan yang masih rendah, korupsi yang kian bertambah dan angka pengangguran dari kalangan intelektual (sarjana) dari hari ke hari angka statistiknya kian naik. Tentu hal ini sangat memprihatinkan bagi kalangan pemerhati pendidikan di Indonesia, hingga berujung pada satu kesimpulan bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan di negara kita. Dan perlu adanya perbaikan yang menyeluruh terhadap masalah pendidikan di negara kita ini.

Berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia cukup banyak, mulai dari masalah kurikulum, kualitas, kompetensi, bahkan kompetensi kepemimpinan baik itu di jajaran tingkat atas maupun tingkat bawah. Berbagai kasus keluhan-keluhan terjadi di lapangan, baik pimpinan sekolah maupun para pendidik yang menyangkan dimensi kepemimpinan seperti soal manajemen, disiplin, birokrasi dan administrasi yang berantakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga soal kepemimpinan di perguruan tinggi turut berperan mewarnai wajah penyelenggaraan dunia pendidikan serta memperlebar kesenjangan dan konflik internal para pendidik.

Pendidikan Ekonomi merupakan salah satu program studi yang ada di FKIP Universitas Jambi yang turut ikut serta berperan dalam memperkecil kesenjangan dalam dunia pendidikan. Sesuai dengan visi Pendidikan Ekonomi yaitu untuk menghasilkan tenaga pendidik ekonomi yang unggul di bidang akademik dan pedagogik yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha, pendidikan ekonomi ini senantiasa memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswanya untuk disiapkan sebagai calon guru ekonomi. Oleh karena itu, setelah belajar di program studi ini diharapkan mahasiswa bisa menjalankan karirnya sesuai dengan visi program studi, yaitu menjadi calon guru ekonomi, wirausaha dan asisten peneliti.

Hadirnya kebijakan pembelajaran dengan Program MBKM, tentu saja memberikan banyak ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keilmuan di perguruan tinggi secara fleksibel, yang bukan hanya mengharuskan duduk di kelas untuk mengikuti perkuliahan, akan tetapi dapat pula mendapatkan

ilmu dan keterampilan sesuai kompetensinya, melalui program-program yang dikembangkan oleh mitra yang ada di luar kampus. "Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh" (Kemendikbud, 2020).

Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai penerapan Program MBKM oleh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi maka dapat meningkatkan Soft Skill Mahasiswa Angkatan 2019 Di Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini juga diungkapkan oleh Ratna Puspitasari dan Riant Nugroho (Puspitasari & Nugroho, 2021) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa: "Kebijakan MBKM diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia, melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi

dengan dunia kerja, dan adanya kegiatan-kegiatan di luar kampus yang memperluas wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mahasiswa, diharapkan mahasiswa memiliki nilai tambah dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Kegiatan belajar yang ditawarkan dari program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi yaitu (1) Pertukaran Pelajar; (2) Magang/Praktek Kerja; (3) Asisten Mengajar; (4) Proyek Kemanusiaan; (5) Penelitian/Riset; (6) Kegiatan Wirausaha; (7) Studi/Proyek Independen; (8) Membangun Desa/KKN (Kemendikbud, 2020).

**Tabel 1.1 Hasil Observasi Awal**

| No | Pertanyaan  | Jawaban  |
|----|---|--|
| 1  | Apakah penggunaan MBKM di program studi pendidikan Ekonomi berjalan dengan baik?  | Sudah berjalan baik, tetapi masih ada beberapa kebijakan yang belum terlaksana atau mahasiswa masih belum mengetahui   |
| 2  | Mengapa masih ada kebijakan yang mahasiswa belum mengetahui ?   | Banyak hal yang mendasari hal ini, salah satunya kurangnya pengadaan informasi tentang kurikulum MBKM, seperti yang diketahui kurikulum terus berubah seiring pergantian menteri Pendidikan.   |
| 3  | Apakah dalam program studi pendidikan Ekonomi terdapat problematika?  | Ya, tentu saja. Beberapa problematika di pendidikan ekonomi sendiri seperti yang telah di bahas masih banyak mahasiswa belum paham akan kebijakaan mbkm dan program-programnya, kemudian terlalu banyak teori dibandingkan praktek lapangan hal ini bis amembuat kemampuan mahasiswa yang kurang.  |
| 4  | Pendidikan Ekonomi tentu saja memiliki harapan bahwa setiap mahasiswa yang lulus dari prodi ini akan menjadi seorang pengajar, tetapi apakah pada kenyataannya ini sesuai dengan harapan dirikannya pendidikan Ekonomi ini? | Tentu saja harapannya agar pendidikan Ekonomi menumbuhkan bibit-bibit calon pengajar. Namun hal itu tentu kembali lagi kepada masing-masing mahasiswa/i ingin menjadi apa setelah lulus nanti. Tapi dengan kuliahnya di Pendidikan sudah seharusnya ketika telah lulus berada pada jalur pendidikan. Tetapi jika banyak juga lulusan yang masih belum bekerja. |
| 5  | Apakah hal ini juga menjadi masalah di program studi?   | Hal ini menjadi salah satu problem juga di Pendidikan Ekonomi karena banyaknya alumni yang bekerja sedikit banyak mempengaruhi akreditasi prodi. Akreditasi prodi saat ini adalah B dengan harapan semakin banyak mengirim data track record   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | alumni dapat digunakan sebagai syarat kenaikan akreditasi.  |
| 6 | Kelinieritasan pendidikan dosen yang mengajar juga berpengaruh unntuk pendidikan Ekonomi? | Tentu saja, tidak mungkin kita merekrut dosen yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan Ekonomi. Ada memang dosen yang tidak linier ijazahnya tetapi masih dalam ranah pendidikan. |

Sumber : Hasil data Observasi diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan pada sebagian mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2020-2022 terdapat problematika pendidikan ekonomi berpatokan pada poin-poin berikut ini, yaitu (1) adanya ketidakseimbangan antara teori dan kenyataan, keterbatasan keterampilan *soft skill* menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakseimbangan tersebut. Jika didasarkan pada teori dalam kurikulum seharusnya mahasiswa yang kuliah di Pendidikan Ekonomi setelah menjadi alumni menekuni profesi guru ekonomi, namun pada kenyataannya berdasarkan *track record* alumni, tidak semua bekerja sebagai seorang guru ekonomi, sebagian memilih bekerja menjadi karyawan swasta dan sebagian melanjutkan studi. (2) Akreditasi pendidikan ekonomi saat ini adalah baik sekali (B) hal ini juga menjadi salah satu masalah bagi alumni yang akan melanjutkan studi Pascasarjana di kampus ternama yang memiliki syarat akreditasi A lebih diutamakan. Permasalahan akreditasi ini sudah seharusnya diatasi oleh kerjasama mahasiswa maupun dosen agar terus meningkat menjadi Unggul Sekali. (3) kualifikasi linieritas dosen masih belum seimbang, sebagian besar dosen umumnya memiliki latar belakang linier pada pendidikan ekonomi untuk jenjang S1, S2, maupun S3. Tetapi sebagian lainnya berlatar belakang pendidikan yang cukup bervariasi, seperti bisnis, ilmu administrasi, administrasi pendidikan, psikologi industri, manajemen pendidikan, penelitian pendidikan. (4) kebijakan pendidikan yang selalu berubah seiring bergantinya pemerintahan menyebabkan

kekacauan dalam praktik pendidikan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, hal ini dirasa sangat tergesa-gesa untuk tenaga pendidik (guru dan dosen serta perangkat staff pendidikan) dalam mempelajari kurikulum yang terbaru. Hal ini juga dirasakan dalam pendidikan ekonomi yang terus mempelajari dan mengejar untuk dapat melaksanakan berbagai kebijakan kurikulum MBKM agar dapat terealisasi seluruhnya karena saat ini dari 8 kebijakan MBKM, 4 diantaranya masih belum dilaksanakan.

Problematika pendidikan ekonomi di era *society* tentu banyak seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada kenyataannya penerapan kurikulum merdeka juga belum berjalan dengan baik, masih banyak pelaksanaan MBKM yang harus dimaksimalkan agar masalah yang ada dapat diatasi dengan sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dengan kurikulum merdeka dan kurangnya waktu dan pelatihan bagi pendidik untuk penerapan kurikulum merdeka kampus merdeka, sehingga pemahaman proses penerapan kebijakan kurikulum merdeka tidak maksimal. Di era serba digital saat ini sudah seharusnya pembelajaran berjalan dengan baik.

Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi terkait kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diimplementasikan di Perguruan Tinggi utamanya pada pendidikan ekonomi di era disrupsi dan era *society*. Sedangkan fokus utama dalam penelitian ini yaitu implementasi MBKM dalam menghadapi problematika pendidikan Ekonomi, dan implementasinya di Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam Menghadapi Problematika Pendidikan Ekonomi di Era Disrupsi dan *Society 5.0* Universitas Jambi**”

### **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menghadapi problematika pendidikan ekonomi pada era disrupsi dan *society 5.0*.
2. Keefektifan Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menghadapi problematika pendidikan ekonomi di era disrupsi dan *society 5.0*.
3. Solusi implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menghadapi problematika pendidikan ekonomi di era disrupsi dan *society 5.0*.

### **1.3 Batasan Dan Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat batasan dan lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penggunaan kurikulum MBKM untuk mengatasi problematika pendidikan ekonomi yang terjadi di era disrupsi

dan *society 5.0*, untuk memperbaiki kendala yang terjadi selama proses pembelajaran.

## 2. Problematika Pendidikan Ekonomi di Era Disrupsi dan Era Society

Problematika pendidikan ekonomi di era disrupsi dan era *society 5.0* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permasalahan pendidikan ekonomi yang ada di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, terkhusus fokus pada permasalahan sumber daya manusia (mahasiswa).

### 1.4 Keterbatasan Penelitian

Dari observasi penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menimbulkan gangguan dan kurangnya hasil penelitian ini. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang peneliti dapatkan. Sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik dari segi hasil penelitian maupun analisisnya.
2. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal
3. Keterbatasan pengetahuan penulis dalam membuat dan menyusun tulisan ini, sehingga perlu diuji Kembali keandalannya di masa depan.
4. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini membuat hasil kurang maksimal.
5. Penelitian ini jauh dari sempurna, maka untuk penelitian berikutnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menghadapi problematika pendidikan ekonomi pada era disrupsi dan *society 5.0* .
2. Untuk menganalisis keefektifan pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menghadapi problematika pendidikan ekonomi di era disrupsi dan *society 5.0*.
3. Untuk menganalisis solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi kendala dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menghadapi problematika pendidikan ekonomi di era disrupsi dan *society 5.0*.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan baru yang terkait dengan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka, problematika pendidikan ekonomi dan perubahan era yang menuju ke *society* serta bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi mahasiswa

Dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi mahasiswa agar bisa mengembangkan program kurikulum merdeka belajar kampus merdeka agar segala problematika yang ada dapat diatasi dan lulusan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dapat memiliki kualitas sumber daya

manusia yang berkualitas. Kebijakan program MBKM dapat dirasakan dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi.